DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Disampaikan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Magister Ekonomi pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Universitas Tanjungpura

Yuliana Rikin
NIM. B2052231019

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	:	Yuliana Rikin
NIM	:	B2052231019
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul Tesis	:	Determinan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, Januari 2025



Yuliana Rikin
NIM. B2052231019

PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

Nama	:	Yuliana Rikin
NIM	:	B2052231019
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul Tesis	:	Determinan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan sebenarnya – benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak tulisan karya orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyandang gelar Magister Ekonomi**.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya,



Yuliana Rikin
NIM. B2052231019

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Determinan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Ini diajukan oleh:

Nama	: Yuliana Rikin
NIM	: B2052231019
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	: Keuangan Daerah
Tanggal Ujian	: 9 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister:

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing 1	Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D NIP. 196912011994032004	12/2 2025	
Pembimbing 2	Dr. Jumhur, S.E., M.S.i NIP. 196709281997021001	12/2 2025	
Penguji 1	Dr. Achmad Yani, S.E., M.Si NIP. 196212291988101001	11/2 2025	
Penguji 2	Dr. Windhu Putra S.E., M.Si NIP. 196404281989031004	12/2 2025	

Pontianak, Febr 2025

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Erni Panca Kumiasih, SE, M.Si

NIP. 197206071998032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-NYA sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul ***Determinan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat***.

Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, informasi, penjelasan dan saran-saran yang sangat berguna bagi penyusunan tesis ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Barkah. S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Rosyadi, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Jumhur, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan yang tulus dan ikhlas selama proses penulisan tesis.
4. Bapak Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si dan Bapak Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik, dukungan dan arahan dalam rangka perbaikan demi kesempurnaan tesis ini.
5. Pengelola dan Staf Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Para dosen pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat bearti selama menempuh Pendidikan.
7. Terima Kasih untuk semua karunia, berkat dan rahmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa hingga saat ini bisa menyelesaikan studi saya sampai akhir.

8. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang sejak dahulu selalu memberikan doa, perhatian, motivasi dan materi yang tiada henti dan tanpa pamrih hanya untuk membuat anaknya menjadi yang terbaik.
9. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan angakatan 31 semoga kita semua semakin sukses.
10. Semua yang telah turut andil memberikan doa, dukungan dan bantuan selama Pendidikan hingga tesis ini selesai, hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas kebaikan semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian materi maupun teknisnya. Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut terkait dengan topik tesis ini, oleh karena itu mohon kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

Pontianak, Januari 2025

Penulis

Yuliana Rikin

ABSTRAK

Determinan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Yuliana Rikin

Email : B2052231019@student.untan.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kemiskinan, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup terhadap ketimpangan pendapatan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan merupakan data panel yang menggabungkan data *cross section* dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan beberapa periode waktu *(time series)* dari tahun 2016 hingga 2023. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi berganda *(Multiple Linear Method)* dengan software *EViews* 12. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara pendapatan per kapita dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan Rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci : Ketimpamgan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Kemiskinan, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Provinsi Kalimantan Barat, Multiple Linear Method

ABSTRACT

Determinants of Income Inequality Between Regencies/Cities in West Kalimantan Province

Yuliana Rikin

Email : B2052231019@student.untan.ac.id

This study aims to determine and test the effect of economic growth, per capita income, poverty, average length of schooling and life expectancy on income inequality in 14 districts/cities in West Kalimantan Province. The data used is panel data that combines cross-section data from 14 districts/cities in West Kalimantan Province with several time periods (time series) from 2016 to 2023. The analysis was carried out using the multiple linear regression method with EViews 12 software. Economic growth has a negative and significant effect on income inequality, while per capita income and poverty have a positive and significant effect on income inequality. Meanwhile, average length of schooling and life expectancy have a negative and significant effect on income inequality.

Keywords: Income Inequality, Economic Growth, Per Capita Income, Poverty, Average Years of Schooling, Life Expectancy, West Kalimantan Province, Multiple Linear Method.

RINGKASAN

Pembangunan ekonomi menjadi indikator utama kemajuan sebuah wilayah, dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pengurangan kemiskinan sebagai parameter utamanya. Namun, pembangunan ini sering kali menghadapi tantangan distribusi manfaat yang tidak merata, menciptakan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Ketimpangan ini, diukur melalui indeks Gini, menjadi tolok ukur sejauh mana kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati oleh seluruh lapisan. Ketika indeks Gini mendekati nol, distribusi pendapatan dinilai semakin merata. Namun, jika nilainya tinggi, ini menunjukkan bahwa kelompok kaya menguasai proporsi besar dari total pendapatan, sementara kelompok miskin tertinggal jauh. Ketimpangan pendapatan tak hanya menghambat kesejahteraan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, inefisiensi ekonomi, dan memperbesar kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada redistribusi kekayaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan.

Di Provinsi Kalimantan Barat, ketimpangan pendapatan menjadi isu serius meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat, distribusi manfaatnya cenderung timpang. Sektor pertanian dan perkebunan, yang menjadi andalan daerah, masih memberikan pendapatan yang rendah bagi mayoritas penduduk. Selain itu, akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, terutama di daerah pedalaman, semakin memperburuk ketimpangan ini. Infrastruktur yang terbatas menjadi kendala besar dalam menghubungkan daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, sehingga mempersempit peluang bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagai contoh, daerah perkotaan seperti Kota Pontianak memiliki tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan kabupaten terpencil seperti Kapuas Hulu, yang menegaskan perlunya kebijakan lebih inklusif untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Lala et al. (2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, pada tahap awal pembangunan, sesuai teori Kuznets, ketimpangan justru cenderung meningkat karena sektor-sektor tertentu, seperti industri, tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor tradisional seperti pertanian. Kondisi ini relevan di Kalimantan Barat, di mana kontribusi sektor modern terhadap pertumbuhan belum merata di seluruh wilayah. Pada saat yang sama, manfaat dari pertumbuhan sering kali terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terutama mereka yang sudah memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya ekonomi.

Pendapatan per kapita, sebagai indikator kesejahteraan, juga memiliki hubungan yang kompleks dengan ketimpangan pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu diiringi dengan distribusi yang adil. Di Kalimantan Barat, meskipun pendapatan per kapita meningkat secara rata-rata, kelompok berpenghasilan rendah tetap menghadapi kesulitan dalam meningkatkan

taraf hidup mereka. Penelitian oleh Wijaya et al. (2017) menegaskan bahwa pendapatan per kapita dapat mengurangi ketimpangan jika pertumbuhannya diarahkan untuk mendukung kelompok miskin melalui investasi pada sektor-sektor produktif dan pembangunan infrastruktur dasar. Namun, jika peningkatan pendapatan per kapita hanya terkonsentrasi pada kelompok kaya, ketimpangan akan semakin melebar.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor signifikan yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Dalam studi oleh Hindun et al. (2019), ditemukan bahwa pengurangan kemiskinan dapat membantu menurunkan ketimpangan dengan memberikan akses lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, di Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih cukup tinggi, yang mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, yang memiliki margin keuntungan rendah, memperburuk kondisi ini. Selain itu, investasi yang minim di sektor-sektor bernilai tambah tinggi menghambat penciptaan lapangan kerja yang dapat membantu mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah ini.

Rata-rata lama sekolah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, jika akses pendidikan tidak merata, ketimpangan akan tetap tinggi. Di Kalimantan Barat, rata-rata lama sekolah masih rendah di banyak daerah pedalaman, mencerminkan kesenjangan dalam akses pendidikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan dan biaya yang tinggi bagi keluarga kurang mampu. Studi oleh Laila et al. (2024) menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan dapat membantu menurunkan ketimpangan dengan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Angka harapan hidup, yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan, juga memengaruhi ketimpangan pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan angka harapan hidup dapat mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun, jika layanan kesehatan tidak merata, manfaat ini hanya akan dirasakan oleh kelompok tertentu. Di Kalimantan Barat, angka harapan hidup di daerah pedalaman lebih rendah dibandingkan di daerah perkotaan, mencerminkan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang memperluas cakupan layanan kesehatan, termasuk meningkatkan infrastruktur dan tenaga kesehatan di daerah terpencil, untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat menikmati manfaat dari perbaikan kesehatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemiskinan, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah mendorong peningkatan pendapatan, distribusi manfaatnya masih timpang. Faktor struktural seperti rendahnya akses pendidikan, terbatasnya infrastruktur, dan ketergantungan pada sektor tradisional menjadi penghambat utama dalam mengurangi ketimpangan. Kebijakan yang berfokus pada

redistribusi pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan akses kesehatan diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, pemerintah di Kalimantan Barat harus mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang merata. Upaya ini harus diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pengembangan sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan perluasan akses ke pasar kerja inklusif juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, ketimpangan dapat dikurangi secara bertahap, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Kesimpulannya, ketimpangan pendapatan bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga sosial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan memahami hubungan antara faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemiskinan, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup, kebijakan yang lebih efektif dapat dirancang untuk mengatasi ketimpangan ini. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, Kalimantan Barat dapat mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

SUMMARY

Economic development serves as a primary indicator of a region's progress, with economic growth, per capita income, and poverty reduction as its key parameters. However, development often faces the challenge of unequal distribution of benefits, creating significant income inequality. This inequality, measured by the Gini index, serves as a benchmark for assessing the extent to which the well-being of society is equitably distributed. When the Gini index approaches zero, income distribution is considered more equal. Conversely, a high index indicates that the wealthiest groups control a substantial share of total income, leaving the less privileged far behind. Income inequality not only hampers societal welfare but also has the potential to create social tensions, economic inefficiency, and widen regional disparities. Hence, policies focused on wealth redistribution and enhancing access to basic services are urgently needed.

In West Kalimantan Province, income inequality remains a critical issue despite relatively stable economic growth in recent years. Data reveals that while Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth has increased, the distribution of its benefits remains uneven. Dominant sectors such as agriculture and plantations still generate low income for most residents. Moreover, unequal access to education and healthcare, particularly in remote areas, exacerbates the inequality. Limited infrastructure poses a significant barrier to connecting rural areas with economic hubs, thereby narrowing opportunities for rural communities to improve their living standards. For instance, urban areas like Pontianak City enjoy higher per capita income compared to remote districts such as Kapuas Hulu, underscoring the need for more inclusive policies to address these disparities.

Research on economic growth and income inequality shows varying results. Some studies, such as Lala et al. (2023), find that economic growth can reduce inequality by expanding employment opportunities and increasing community income. However, during the early stages of development, as per the Kuznets theory, inequality tends to rise because certain sectors, such as industry, grow faster than traditional sectors like agriculture. This condition is relevant in West Kalimantan, where the contributions of modern sectors to growth are not evenly distributed across regions. At the same time, the benefits of growth often concentrate among certain groups, particularly those with better access to economic resources.

Per capita income, as a measure of prosperity, also has a complex relationship with income inequality. Research indicates that rising per capita income does not always translate to fair distribution. In West Kalimantan, although average per capita income has increased, low-income groups continue to struggle to improve their living standards. Research by Wijaya et al. (2017) emphasizes that per capita income can reduce inequality if its growth is directed toward supporting the poor through investments in productive sectors and basic infrastructure development. However, if the rise in per capita income is concentrated among the wealthy, inequality will continue to widen.

Poverty is a significant factor influencing income inequality. In a study by Hindun et al. (2019), it was found that poverty reduction can help lower inequality by providing broader access to education, healthcare, and employment. However, in West Kalimantan, rural poverty remains high, reflecting inequality in access to basic services. Dependence on traditional agricultural sectors with low profit margins exacerbates this condition. Additionally, minimal investment in high-value sectors hampers the creation of jobs that could help reduce poverty. This demonstrates that addressing poverty must be a priority in efforts to reduce income inequality in the region.

The average length of schooling is another crucial factor affecting income inequality. Studies show that higher education levels tend to increase individuals' skills and productivity, which, in turn, can raise their income. However, if access to education is uneven, inequality remains high. In West Kalimantan, the average length of schooling is still low in many rural areas, reflecting disparities in access to education. This is due to limited educational infrastructure and high costs for underprivileged families. A study by Laila et al. (2024) highlights that improving access to education can help reduce inequality by offering fairer opportunities for all societal groups to enhance their living standards.

Life expectancy, reflecting the quality of healthcare services, also impacts income inequality. Research indicates that higher life expectancy can reduce inequality by increasing community productivity. However, if healthcare services are not evenly distributed, these benefits will only be felt by certain groups. In West Kalimantan, life expectancy in rural areas is lower than in urban areas, reflecting limited access to healthcare facilities. This underscores the need for policies to expand healthcare coverage, including improved infrastructure and medical personnel in remote areas, ensuring that all societal groups can enjoy the benefits of better health services.

Analysis shows that income inequality in West Kalimantan is influenced by the complex interaction of economic growth, per capita income, poverty, average length of schooling, and life expectancy. Although economic growth has driven income increases, the distribution of its benefits remains uneven. Structural factors such as limited access to education, inadequate infrastructure, and dependence on traditional sectors are major obstacles to reducing inequality. Policies focusing on income redistribution, improving education quality, and expanding healthcare access are essential to address these challenges.

To reduce income inequality, the government in West Kalimantan must adopt a holistic approach encompassing the development of infrastructure, education, and healthcare. These efforts should be accompanied by redistributive policies to ensure that the benefits of economic growth are felt by all societal layers. Furthermore, developing high-value sectors and expanding access to inclusive labor markets are crucial to enhancing community welfare. Through such approaches, inequality can be gradually reduced, creating a more just and inclusive society.

In conclusion, income inequality is not merely an economic issue but also a social challenge that requires serious attention from various stakeholders. By understanding the relationship between factors such as economic growth, per capita income, poverty, average length of schooling, and life expectancy, more effective

policies can be designed to address this inequality. If these measures are implemented consistently and sustainably, West Kalimantan can achieve more inclusive and equitable economic development.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **ii**
PERTANGGUNGJAWABAN TESIS ..... **iii**
PENGESAHAN TESIS ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN ..... **vi**
SUMMARY ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Permasalahan 11
1.2.1 Penyataan Masalah Penelitian 11
1.2.2 Pertanyaan Penelitian 13
1.3 Tujuan Penelitian 13
1.4 Kontribusi Penelitian dan Kontribusi Teoritis 14
1.4.1 Kontribusi Penelitian 14
1.4.2 Kontribusi Teoritis 14
1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
2.1 Landasan Teori 15
2.2 Kajian Empiris 18
2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan 18
2.2.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Ketimpangan Pendapatan 22
2.2.3 Pengaruh Kemiskinan terhadap terhadap Ketimpangan Pendapatan 26
2.2.4 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Pendapatan 29
2.2.5 Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Ketimpangan Pendapatan 34
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 37
2.3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 37
2.3.2 Hipotesis Penelitian 37
BAB III METODE PENELITIAN **39**
3.1 Bentuk Penelitian 39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 39
3.3 Data 39
3.4 Variabel Penelitian 40
3.5 Metode Analisis 41
3.5.1 Analisa Regresi Berganda 41
3.5.2 Spesifikasi Model 41
3.5.3 Uji Asumsi Klasik 41
3.5.4 Model Regresi 42
3.5.5 Penentuan Model regresi 42
3.5.6 Model Uji Hipotesis 43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **45**

4.1 Hasil....45
4.1.1 Hasil Uji Asumsi Klasik....45
4.1.2 Hasil Pemilihan Model Regresi Linier Berganda....47
4.1.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda....48
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis....50
4.2 Pembahasan....52
4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat....52
4.2.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat....54
4.2.3 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat....58
4.2.4 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat....61
4.2.5 Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat....64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN....68
5.1 Kesimpulan....68
5.2 Saran....69
DAFTAR PUSTAKA....72

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Hasil Uji Heterokedastisitas 46
Tabel 4 2 Hasil Uji Multikolinieritas.....46
Tabel 4 3 Tabel Hasil Uji.....47
Tabel 4 4 Tabel Hasil Uji Hipotesis dari Fixed Effect Model.....48
Tabel 4 5 Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Barat (rupiah), 2023 . 55
Tabel 4 6 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2023 58
Tabel 4 7 Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat (rupiah), 2023 61
Tabel 4 8 Jumlah Rumah Sakit Umum, Jumlah Rumah Sakit Khusus, Jumlah Posyand, Jumlah Puskesmas dan Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimatan Barat, 2023 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat 4
Gambar 1. 2 Perbandingan Gini Ratio dan Pendapatan Perkapita Provinsi Kalimantan Barat 5
Gambar 1. 3 Perbandingan Gini Ratio dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat 7
Gambar 1. 4 Perbandingan Gini Ratio dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Barat 8
Gambar 1. 5 Perbandingan Gini Ratio dan Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat 9
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian.....37
Gambar 4 1 Hasil Uji Normalitas.....45
Gambar 4 2 Pertumbuhan Perekonomian 3 Sektor 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan penanda utama dari kesehatan ekonomi suatu wilayah, termasuk bagaimana struktur ekonomi berkembang dan bagaimana ketimpangan pendapatan antara penduduk, daerah, dan sektor dapat dikurangi. Setiap daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, yang diukur melalui pembangunan ekonomi dengan menggunakan PDB atau PDRB. Tujuan utama dari upaya ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan pendapatan sendiri diukur dengan "Koefisien Gini" di mana nilai yang mendekati nol menandakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Ketidakmerataan dalam pertumbuhan ekonomi bisa mempengaruhi kesejahteraan di berbagai wilayah, yang pada akhirnya dapat memperbesar ketimpangan pendapatan antar daerah.

Masalah ketimpangan pendapatan adalah tantangan global yang dihadapi oleh setiap negara dan membutuhkan penanganan segera. Ketidakmerataan pendapatan di antara penduduk suatu wilayah dapat diukur dengan indeks Gini, yang bervariasi di seluruh provinsi di Indonesia dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Apabila peningkatan pendidikan hanya berdampak pada naiknya pendapatan tanpa distribusi yang lebih merata, ketimpangan pendapatan akan bisa semakin parah. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui kebijakan yang fokus pada perbaikan distribusi pendapatan di berbagai aspek. Menurut Todaro & Smith (2020) Ketimpangan Pendapatan ialah perbedaan yang mencolok dalam pendapatan masyarakat. Todaro juga menambahkan bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial, dan menurunkan solidaritas, serta dianggap tidak adil.

Pada awal proses industrialisasi, ketimpangan pendapatan sering kali meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara sektor industri dan agraris. Sektor industri yang berkembang pesat dapat menghasilkan pendapatan yang

lebih tinggi dibandingkan sektor agraris yang relatif stagnan, menyebabkan kesenjangan pendapatan yang lebih besar. Namun, seiring dengan kemajuan ekonomi dan penerapan kebijakan redistribusi serta peningkatan akses ke pendidikan dan layanan sosial, ketimpangan pendapatan biasanya mulai menurun. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Simon Kuznets dalam buku nya, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan bisa berkurang seiring dengan perkembangan ekonomi yang lebih matang (Muhammad Shahbaz et al., 2023).

Menurut Todaro dan Smith, perbedaan pendapatan di suatu wilayah tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dalam proses pembangunan. Ketimpangan ini dapat memiliki dampak positif maupun negatif bagi daerah yang bersangkutan. Di satu sisi, ketimpangan dapat mendorong daerah yang kurang berkembang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya agar tidak semakin tertinggal dari daerah yang lebih maju. Selain itu, persaingan antar daerah dalam meningkatkan kualitas hidup juga dapat dianggap sebagai dampak positif dari adanya ketimpangan. Namun, ketika ketimpangan antar wilayah semakin besar, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti inefisiensi ekonomi, gangguan terhadap stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketidakadilan yang dirasakan masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Masalah ketimpangan pendapatan tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dapat menimbulkan ketegangan sosial, menghambat mobilitas sosial, dan mengurangi kesempatan bagi kelompok yang kurang beruntung. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab dan dampak ketimpangan pendapatan serta mengeksplorasi kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan ini.

Ketidakmampuan Provinsi Kalimantan Barat untuk menurunkan Gini Ratio secara signifikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata, terutama di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari pusat-pusat ekonomi utama, bisa menjadi salah satu penyebab stagnasi ini. Kedua, sektor-sektor ekonomi yang mendominasi di Provinsi Kalimantan Barat mungkin tidak memberikan cukup kesempatan kerja yang setara atau peningkatan upah yang signifikan, sehingga menjaga ketimpangan pendapatan tetap berada pada tingkat yang

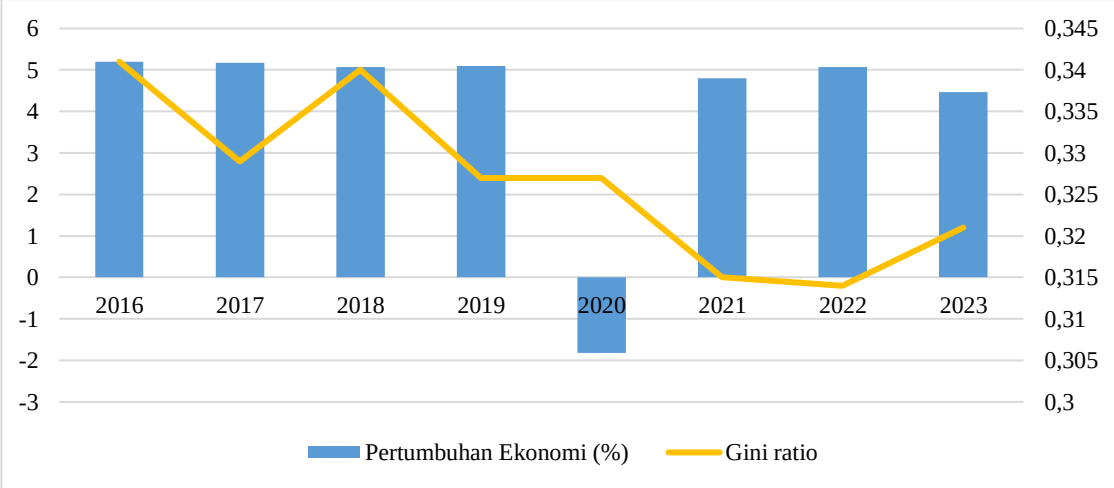
stabil namun tidak membaik. Faktor-faktor struktural ini perlu diatasi agar Gini Ratio dapat diturunkan lebih jauh dan distribusi pendapatan bisa menjadi lebih merata.

Menurut teori Kuznets secara efektif menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan, tetapi hubungan ini tidak berdiri sendiri. Peningkatan pendapatan per kapita sering kali menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, namun tanpa distribusi yang adil, ketimpangan dapat tetap melebar. Selain itu, kemiskinan berperan krusial, karena individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pendidikan, sebagai modal manusia, berkontribusi pada produktivitas dan potensi pendapatan individu, jika akses pendidikan tidak merata, ketimpangan akan terus berlanjut. Demikian pula, kesehatan yang buruk dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara produktif dalam ekonomi, sehingga menciptakan siklus yang memperkuat ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, semua faktor ini pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemiskinan, pendidikan, dan Kesehatan berinteraksi dalam cara yang kompleks dan saling terkait dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Barat, masalah ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan serius, yang tampak jelas dari data Gini Ratio yang menunjukkan minimnya penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan redistribusi yang telah diterapkan belum mampu memberikan dampak nyata dalam mempersempit kesenjangan ekonomi di masyarakat. Mungkin saja terdapat faktor struktural yang masih belum teratasi, seperti ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar, keterbatasan lapangan kerja yang layak, atau perbedaan signifikan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan antar wilayah. Semua ini dapat terus mendorong ketimpangan semakin melebar jika tidak diatasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan yang ada menjadi keharusan untuk mencari tahu mengapa upaya penanggulangan ketimpangan ini belum membuahkan hasil yang memadai. Pendekatan yang diterapkan tidak boleh hanya berfokus pada redistribusi

pendapatan saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek lain yang memengaruhi distribusi ekonomi, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Dengan memperluas cakupan kebijakan dan strategi ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di Kalimantan Barat, serta memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup mereka.



Sumber : BPS Prov. Kalbar

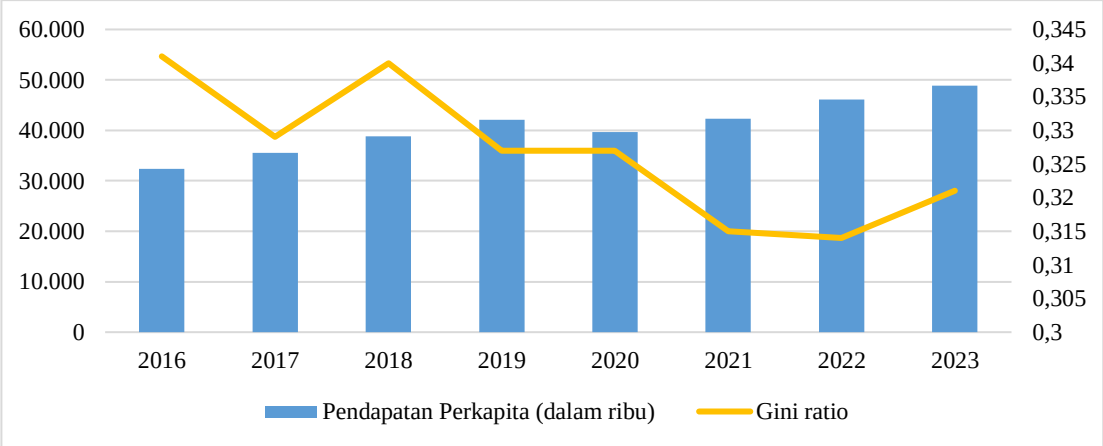
Gambar 1. 1 Perbandingan Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat

Pada gambar 1.1 Gini ratio tertinggi di Kalimantan Barat terjadi pada tahun 2016 dengan angka 0,341, sementara pertumbuhan ekonomi cukup tinggi yaitu 5,2%. Tingginya ketimpangan pendapatan ini bisa disebabkan oleh distribusi ekonomi yang tidak merata, di mana kelompok kaya mendapatkan porsi yang lebih besar dari keuntungan ekonomi dibandingkan kelompok miskin. Meskipun pertumbuhan ekonomi positif, jika sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka dampaknya tidak akan signifikan dalam mengurangi ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan kontraksi sebesar -1,82%, meski Gini ratio tetap di 0,327. Kondisi ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian global, termasuk Kalimantan Barat.

Dampaknya paling dirasakan oleh sektor informal dan pekerja berpenghasilan rendah yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Namun, Gini ratio yang tidak meningkat tajam menandakan bahwa seluruh lapisan masyarakat merasakan dampak ekonomi secara relatif merata, meskipun secara absolut ekonomi sedang mengalami kemerosotan.

Teori Kuznets menegaskan bahwa dalam tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena sektor-sektor tertentu mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan peningkatan kesejahteraan, ketimpangan pendapatan akan menurun, menciptakan kurva berbentuk U terbalik yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sama hal nya dengan penelitian Lala et al. (2023) meskipun telah ada pertumbuhan ekonomi, masalah yang timbul akibat ketidakmerataan pembangunan tetap tidak dapat sepenuhnya diatasi. Beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara daerah lain tumbuh lebih lambat. Ketidakmampuan beberapa daerah untuk berkembang dan maju dengan kecepatan yang sama sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki.



Sumber : BPS Prov. Kalbar

Gambar 1. 2 Perbandingan Gini Ratio dan Pendapatan Perkapita Provinsi Kalimantan Barat

Pada gambar 1.2 Gini ratio tertinggi di Kalimantan Barat terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 0,341, sementara pendapatan per kapita saat itu masih rendah, yaitu

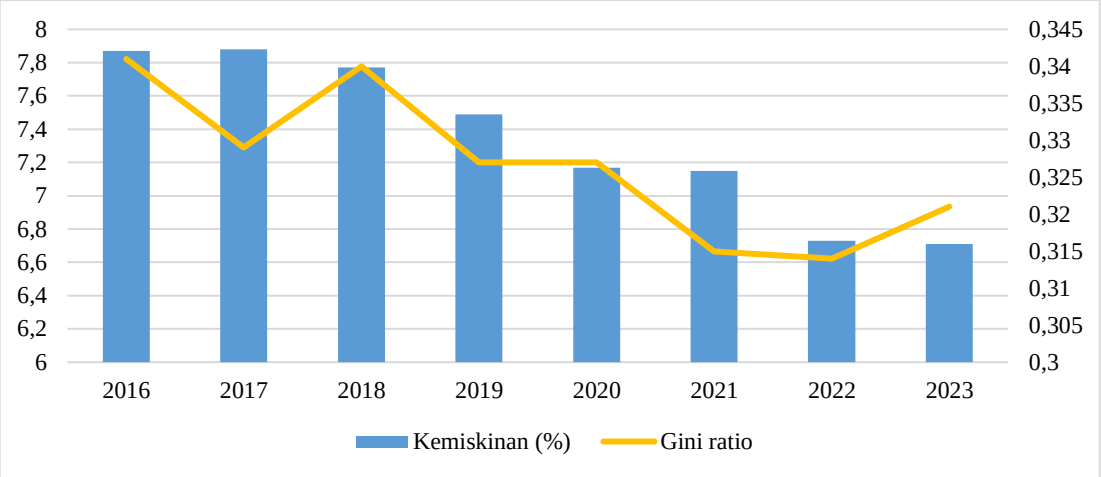
Rp 32.353. Ketimpangan yang tinggi ini menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang menguasai sumber daya ekonomi. Rendahnya pendapatan per kapita pada tahun yang sama juga memperkuat indikasi bahwa mayoritas penduduk memiliki akses terbatas terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang lebih baik. Ketidakmerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan bisa menjadi faktor utama yang memperburuk ketimpangan ini.

Pada tahun 2016, meski beberapa segmen masyarakat mungkin mengalami peningkatan pendapatan, sebagian besar lainnya tidak merasakannya secara merata, sehingga menyebabkan jurang ekonomi melebar. Rendahnya pendapatan per kapita juga bisa disebabkan oleh sektor ekonomi yang didominasi oleh industri primer seperti pertanian dan perkebunan, yang biasanya memiliki margin keuntungan rendah dan kurang memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi pekerjanya. Kombinasi antara ketergantungan pada sektor tradisional dan kurangnya investasi pada sektor dengan nilai tambah tinggi memperburuk situasi ekonomi masyarakat..

Penelitian oleh Wijaya et al. (2017) menunjukkan bahwa peningkatan Gini Rasio sering kali berjalan seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita. Artinya, ketika pendapatan masyarakat secara umum naik, ketimpangan pendapatan antar kelompok juga cenderung ikut meningkat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita bagi kelompok masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Upaya ini harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam jangka panjang agar dapat mengurangi ketimpangan secara efektif.

Todaro & Smith (2020) berpendapat bahwa untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kesenjangan pendapatan antar kelompok, pemerintah perlu mengambil langkah lebih aktif, misalnya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor-sektor yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Pengeluaran untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dapat membantu mempersempit

jurang ketimpangan dan menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua kalangan.



Sumber : BPS Prov. Kalbar

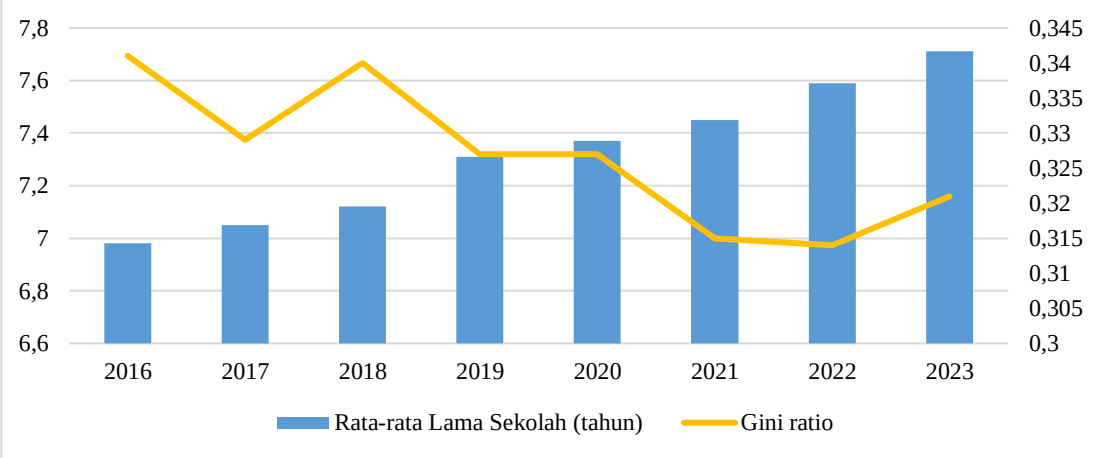
Gambar 1. 3 Perbandingan Gini Ratio dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat

Pada gambar 1.3 Gini ratio tertinggi di Kalimantan Barat pada tahun 2016 sebesar 0,341 diiringi dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi, yaitu 7,87%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, manfaatnya tidak merata, dan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat. Akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan ini. Masyarakat miskin di daerah pedesaan kemungkinan besar memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga memperparah ketidakmerataan pendapatan.

Tingginya kemiskinan di tahun tersebut juga mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan redistribusi yang efektif. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional yang memiliki nilai tambah rendah turut berkontribusi pada rendahnya pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai dan minimnya investasi dalam industri yang lebih produktif dan berkelanjutan menyebabkan keterbatasan kesempatan kerja, sehingga banyak masyarakat tetap terjebak dalam siklus kemiskinan. Oleh karena itu,

untuk terus menurunkan angka kemiskinan, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperluas akses ke layanan dasar bagi penduduk di daerah ini. Sama hal nya dengan Hindun et al. (2019) kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan. Kemiskinan terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan minimum. Ketika kemiskinan berkurang, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya.

Teori Kuznets menunjukkan bagaimana ketimpangan dapat berubah seiring pertumbuhan ekonomi, tetapi Sen menyoroti bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada ketimpangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek kemiskinan dapat menciptakan kelompok-kelompok yang tertinggal, sehingga memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan adalah penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa manfaat yang lebih merata.



Sumber : BPS Prov. Kalbar

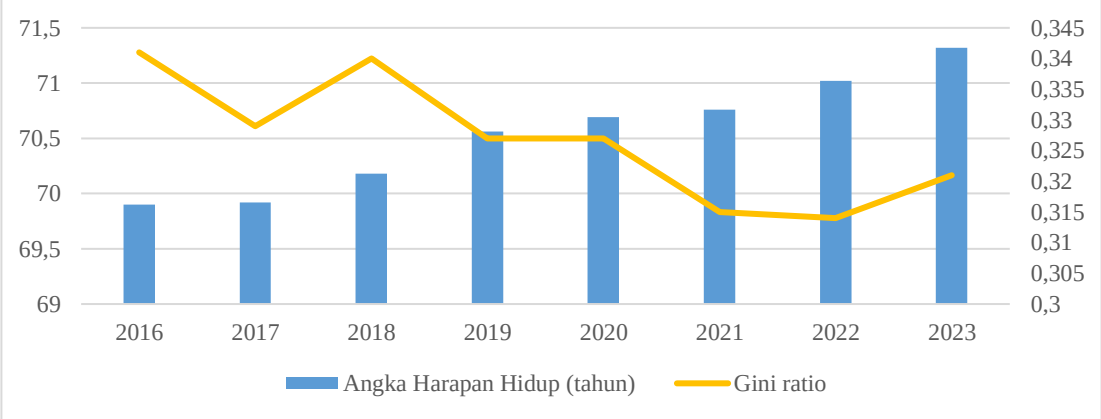
Gambar 1. 4 Perbandingan Gini Ratio dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Barat

Gini ratio tertinggi di Kalimantan Barat pada tahun 2016, sebesar 0,341, bersamaan dengan rata-rata lama sekolah yang rendah, yaitu 6,98 tahun. Ketimpangan pendapatan yang tinggi ini berhubungan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat yang tidak memiliki akses cukup terhadap pendidikan cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, sehingga pendapatan

mereka stagnan. Pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menciptakan kesenjangan yang mendalam antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi, memperburuk ketimpangan ekonomi.

Rendahnya rata-rata lama sekolah juga disebabkan oleh minimnya fasilitas pendidikan dan akses yang sulit di daerah pedesaan atau pelosok. Anak-anak dari keluarga kurang mampu cenderung tidak melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi karena keterbatasan finansial atau kebutuhan untuk membantu keluarga. Kurangnya perhatian pada sektor pendidikan, khususnya dalam pemerataan akses dan kualitas, memperparah ketimpangan ini.. Sama hal dengan penelitian Hindun et al. (2019) faktor ekonomi yang memaksa banyak anak putus sekolah untuk bekerja juga bisa menjadi penyebab rendahnya angka ini. Seharusnya pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan SDM yang handal dalam jangka panjang. Akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pengorbanan dan biaya yang tidak sedikit.

Dalam konteks pendidikan, teori Kuznets dapat menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi awal mungkin menyebabkan ketimpangan yang meningkat jika akses pendidikan tidak merata. Becker menekankan bahwa investasi dalam pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan individu. Jika pendidikan tidak tersedia untuk semua kalangan, ketimpangan pendapatan dapat bertahan atau bahkan meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi.



Sumber : BPS Prov. Kalbar

Gambar 1. 5 Perbandingan Gini Ratio dan Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat

Pada grafik 1.5 pada tahun 2016, Kalimantan Barat mencatat Gini ratio tertinggi sebesar 0,341, bersamaan dengan angka harapan hidup yang relatif rendah, yaitu 69,9 tahun. Ketimpangan pendapatan yang tinggi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kelompok masyarakat yang mungkin mampu mengakses layanan kesehatan berkualitas, sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Rendahnya angka harapan hidup dapat disebabkan oleh ketidakmerataan akses terhadap fasilitas kesehatan, gizi yang buruk, serta keterbatasan dalam memperoleh air bersih dan sanitasi yang baik, yang biasanya lebih sering dialami oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Teori Kuznets dapat dihubungkan dengan teori modal manusia Becker melalui akses terhadap layanan kesehatan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, jika akses terhadap layanan kesehatan tidak merata, individu dengan kesehatan buruk akan tetap terjebak dalam kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Hal yang sama dengan penelitian Laila et al. (2024) mereka menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat menghambat seseorang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, lamanya waktu yang dihabiskan seseorang untuk bersekolah dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di berbagai wilayah di Indonesia. Jika terjadi kesenjangan dalam tingkat pendidikan di suatu daerah, kelompok dengan pendidikan rendah cenderung sulit mendapatkan pendapatan yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan. Sebaliknya, kelompok yang berpendidikan lebih tinggi memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan lebih besar.

Analisis menyimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat tengah menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan pendapatan, meskipun telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan pendapatan per kapita. Ketidakmerataan distribusi pendapatan masih menjadi masalah signifikan yang memengaruhi sebagian besar penduduk. Meskipun tingkat kemiskinan secara

keseluruhan menunjukkan penurunan, hal tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati secara adil manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Salah satu penghambat utama bagi kemajuan sosial ekonomi di Kalimantan Barat adalah rendahnya rata-rata lama sekolah. Faktor ini membatasi mobilitas sosial dan ekonomi, memperpanjang ketimpangan yang ada di wilayah tersebut. Sementara itu, peningkatan angka harapan hidup di provinsi ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup secara umum, tetapi tidak sejalan dengan perbaikan dalam akses pendidikan dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengurangi ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemberantasan kemiskinan serta peningkatan akses pendidikan. Langkah ini harus disertai dengan distribusi ekonomi yang lebih adil, memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya dinikmati segelintir orang. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi serta upaya mengurangi kesenjangan pendidikan dan ekonomi merupakan prioritas penting untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Kalimantan Barat. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Determinan Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat".***

1.2 Permasalahan

1.2.1 Penyataan Masalah Penelitian

Berdasarkan data hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kemiskinan, angka harapan hidup dan rata rata lama sekolah tidak komsisten dengan ketimpangan pendapatan, hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, hal ini tidak selalu diiringi dengan distribusi manfaat yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, sering kali pertumbuhan tersebut justru memperparah ketimpangan, di mana kelompok berpenghasilan tinggi

mendapatkan proporsi keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah. Pendapatan per kapita yang meningkat mungkin tampak positif, namun kenyataannya, sebagian besar pertumbuhan tersebut cenderung terkonsentrasi pada segmen ekonomi yang lebih makmur, sementara kelompok miskin tidak merasakan manfaat yang sama. Kemiskinan tetap menjadi faktor signifikan dalam memperburuk ketimpangan pendapatan karena kelompok miskin sering kali terpinggirkan dari kesempatan ekonomi dan pendidikan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Selain itu, meskipun angka harapan hidup mengalami peningkatan dan akses pendidikan semakin membaik, keduanya tidak secara otomatis memperbaiki ketimpangan pendapatan karena peningkatan kualitas hidup dan pendidikan masih belum diakses secara merata oleh seluruh populasi. Daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang kurang mampu sering kali terjebak dalam siklus rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, sehingga menambah jurang ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan bukanlah masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi, melainkan memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan fokus pada redistribusi sumber daya, akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Berdasarkan penelitian terdahulu hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kemiskinan, angka harapan hidup dan rata rata lama sekolah tidak komsisten dengan ketimpangan pendapatan. Penelitian terdahulu seperti Wijaya et al. (2017), Todaro & Smith (2020) dan Hindun et al. (2019) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat dikurangi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita bagi masyarakat miskin atau kelompok berpenghasilan rendah dalam jangka panjang. Para peneliti juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas ekonomi dan memperluas akses ke layanan dasar bagi penduduk di daerah terpencil. Menurut Hindun et al. (2019) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini dapat diatasi

dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi serta upaya mengurangi kesenjangan pendidikan dan ekonomi.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat?
4. Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat?
5. Apakah angka harapan hidup berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pendapatan perkapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
5. Untuk menguji dan menganalisis angka harapan hidup berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian dan Kontribusi Teoritis

1.4.1 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan kedepan agar dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan petumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kemiskinan, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup dalam pernurunan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4.2 Kontribusi Teoritis

Mampu memberikan masukan/kontribusi bagi pihak pengambil keputusan dalam hal ini yakni pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pihak terkait termasuk peneliti tentang petumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kemiskinan, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup dalam pernurunan ketimpangan pendapatan

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Ketimpangan pendapatan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemiskinan, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Daerahdengan pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, menunjukkan pendapatan per kapita yang lebih besar, namun distribusi yang tidak merata memperdalam kesenjangan. Di sisi lain, daerah pedalaman seperti Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi menghadapi kemiskinan yang tinggi, mencerminkan minimnya akses terhadap manfaat pertumbuhan ekonomi. Rendahnya rata-rata lama sekolah di kabupaten-kabupaten seperti Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas semakin memperburuk ketimpangan, membatasi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Disparitas angka harapan hidup antara perkotaan dan pedesaan juga menunjukkan perbedaan akses layanan kesehatan yang berujung pada ketidakmerataan peluang ekonomi. Oleh karena itu, ketimpangan di Provinsi Kalimantan Barat ditentukan oleh perbedaan signifikan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi antar wilayah.